



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 204/E/KPT/2022  
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i2.31156>  
Volume 11, No. 2, 2026 (1228 - 1247)

---

# PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH, UPAH MINIMUM, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Alya Bunga Nursilo, Tenny Badina, Ahmad Fatoni  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
[5554210047@untirta.ac.id](mailto:5554210047@untirta.ac.id)

## Abstract

*Income inequality remains a serious problem in the Indonesian economy. To achieve equitable social welfare, the government is striving to reduce income inequality in Indonesia. This study aims to analyze the influence of Islamic microfinance, minimum wages, economic growth, and the Human Development Index (HDI) on income inequality in Indonesia. Data used ranges from 2020 to 2024 across 17 provinces in Indonesia. The research method used is a panel data regression analysis model with the selected model being the Fixed Effects Model (FEM). The results of this study indicate that Islamic microfinance and human development index have a negative effect on income inequality in Indonesia, the minimum wage has a positive effect on income inequality in Indonesia and economic growth has no effect on income inequality in Indonesia.*

**Keywords:** *Income Inequality, Gini Index, Sharia Microfinance, Minimum Wage, Economic Growth, Human Development Index.*

## Abstrak

Ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah yang cukup serius dalam perekonomian Indonesia. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata pemerintah berupaya untuk menekan angka ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mikro syariah, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Data yang digunakan tahun 2020-2024 pada 17 provinsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi data panel dengan model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah dan

indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, upah minimum berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

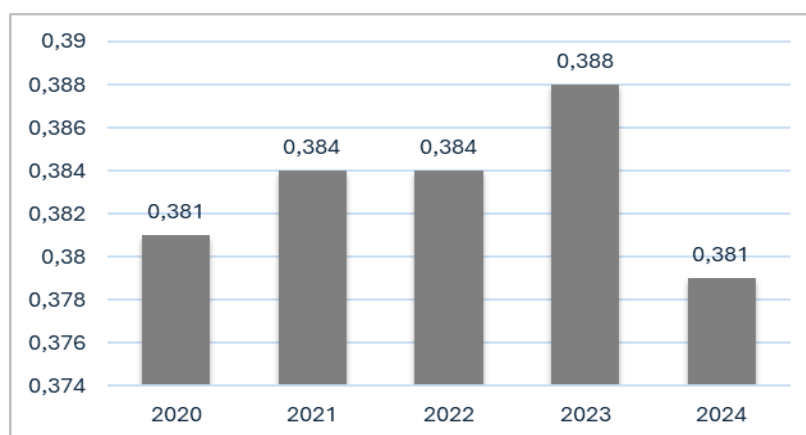
**Kata kunci:** Ketimpangan Pendapatan, Indeks Gini, Pembiayaan Mikro Syariah, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia

## 1. Pendahuluan

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, masalah ketimpangan pendapatan menjadi salah satu hal yang tidak dapat dihindari. Ketidakstabilan ekonomi negara juga dapat dilihat melalui angka ketimpangan yang tinggi (Ahmad & Triani, 2019). Kesenjangan ekonomi maupun sosial dapat dilihat melalui beberapa sudut pandang, seperti dalam hal kekayaan, peringkat, kelas, pendapatan serta kewarganegaraan. Terjadinya pemusatan kekayaan dan pendapatan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sehingga ketimpangan pendapatan menjadi isu penting yang perlu diperhatikan oleh setiap negara, termasuk Indonesia (Marbun, 2018).

Menurut Badan Pusat Statistik (2024) ketimpangan pendapatan merupakan kondisi yang menunjukkan adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan antar individu dalam masyarakat. Ketidakmerataan tersebut selanjutnya dapat dikaitkan dengan konsep “keadilan” pendapatan, dimana akan tidak adil ketika orang kaya di suatu wilayah memiliki proporsi pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan seluruh populasinya (Sungkar et al., 2015). Tingkat ketimpangan pendapatan diukur menggunakan indeks gini untuk menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Indeks gini merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai apakah distribusi pendapatan dalam suatu wilayah timpang atau merata. Tingkat ketimpangan pendapatan dinyatakan dalam rentang nilai antara 0 sampai 1, dimana nilai indeks gini sebesar 0 menunjukkan pemerataan sempurna sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (Damanik et al., 2018).

**Gambar 1. Indeks Gini di Indonesia Tahun 2020-2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

Tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia yang diukur dengan indeks gini pada tahun 2020-2024 masih berada di kisaran 0,38–0,40. Meskipun tingkat ketimpangan pendapatan mengalami penurunan, angka tersebut masih berada pada kategori sedang yang menunjukkan masalah ketimpangan pendapatan belum mampu ditangani dengan baik dan distribusi pendapatan belum merata secara optimal, di mana sebagian kecil penduduk menguasai sebagian besar kekayaan, sementara mayoritas hidup dalam kondisi yang kurang sejahtera (BPS, 2024).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dengan berbagai rencana, kebijakan dan program pembangunan. Namun permasalahan ketimpangan merupakan permasalahan multidimensi sehingga memerlukan upaya komprehensif yang dapat mencakup seluruh aspek yang dapat mempengaruhi ketimpangan (Nalle & Kiha, 2018). Kegagalan lembaga formal dalam mengurangi ketimpangan menyebabkan pergeseran pemikiran terkait pembangunan dan mengarah pada munculnya keuangan mikro (Javid & Abrar, 2015). Pembiayaan mikro syariah berpegang pada prinsip keadilan dan pemerataan ekonomi dalam Islam, yang bertujuan untuk menghindari konsentrasi kekayaan dan mendorong sirkulasi harta di masyarakat (Syarifuddin & Sahidin, 2021). Konsep keadilan ekonomi menurut Ibnu Khaldun tidak hanya menitikberatkan pada aspek distribusi kepemilikan, tetapi juga menekankan peran aktif negara dalam mengawasi mekanisme pasar dan pengelolaan uang agar tidak terjadi akumulasi kekayaan yang berlebihan yang dapat menimbulkan ketimpangan (Nurdiansyah & Andani, 2022).

Pembiayaan mikro syariah adalah pembiayaan yang disalurkan berdasarkan prinsip syariah, seperti bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (*murabahah*), sewa (*ijarah*) dan tanpa melibatkan bunga (*riba*) (Wardiyah, 2019). Larangan *riba* memastikan bahwa nasabah tidak terbebani oleh bunga yang mencekik, terutama saat usaha mereka mengalami kegagalan atau kerugian. Dalam skema bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*), jika usaha merugi, kerugian ditanggung bersama. Hal ini mengurangi risiko kebangkrutan total di kalangan masyarakat miskin dan rentan, mencegah mereka jatuh ke dalam lingkaran utang, dan menjaga stabilitas pendapatan mereka, yang pada akhirnya menekan ketimpangan (Musaiyana et al., 2025). Penelitian (Miled et al., 2022) menunjukkan bahwa keuangan mikro berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Pinjaman bruto per kapita yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat ketidaksetaraan pendapatan yang lebih rendah. Hasil penelitian serupa juga dilakukan oleh (Mwakalila & Muba, 2025) dan (Wardhana et al., 2020) yang menyatakan bahwa pinjaman bank mikro berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu upah minimum. Upah minimum merupakan batas upah terendah yang diterima pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, serta berfungsi sebagai acuan bagi perusahaan atau pelaku usaha dalam menetapkan besaran upah bagi tenaga kerjanya (Fanshuri & Saputra, 2022). Menurut Sutiono & Syafitri (2018), upah minimum dapat mengurangi kesenjangan melalui penciptaan lapangan kerja. Hal ini terjadi karena kenaikan upah minimum yang tinggi cenderung menarik minat calon tenaga kerja

untuk mencari pekerjaan, sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja. Hal ini didukung oleh penelitian (Sulistyaningrum et al., 2022), (Raziq & El Hasanah, 2023) dan (Meidiyan et al., 2025) yang menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Selain upah minimum, pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara atau wilayah secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu (Yunianto, 2021). Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin meningkat pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan tidak selalu linier. Menurut Lunberg dan Squire dalam (Hendarmin, 2019) menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpotensi mendorong meningkatnya ketimpangan pendapatan, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka ketimpangan pendapatan cenderung semakin besa. Penelitian (Rodionov et al., 2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti semakin tinggi nilai pertumbuhan ekonomi maka akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (A. S. Putri & Anggraini, 2024), (Budiarto et al., 2024), (Novia & Utomo, 2022). Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Helmy et al., 2024), (Yoertiara & Feriyanto, 2022), (Sulistyaningrum et al., 2022), (Fitriani et al., 2018) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan adalah kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004, IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. IPM merupakan indeks yang menilai capaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Menurut BPS (2024) komponen-komponen tersebut meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Ketiga komponen tersebut merupakan dimensi penting dalam kesejahteraan masyarakat (Mudana & Purbadharmaja, 2024). Indeks Pembangunan Manusia mencerminkan investasi suatu wilayah dalam modal manusia yang secara teoritis dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pada gilirannya mengurangi ketimpangan pendapatan (Tarmidzi, 2012). Penelitian yang mendukung dilakukan (Helmy et al., 2024), (Meidiyan et al., 2025), (Makipantung et al., 2023) dan (Farhan & Sugianto, 2022) yang mengungkapkan bahwa IPM berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian (Sulistyaningrum et al., 2022), (Febriyani & Anis, 2022) dan (Irawan et al., 2024) yang mengungkapkan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mikro syariah, upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia

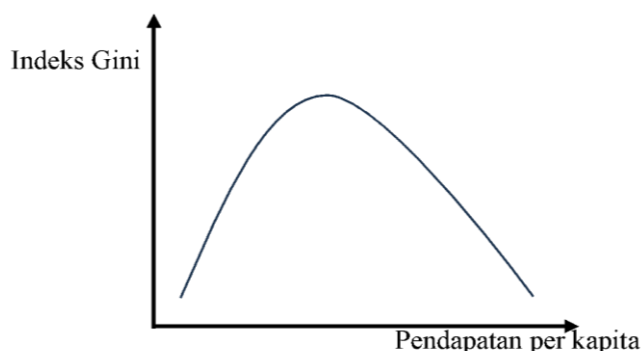
terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, guna mengatasi ketimpangan pendapatan yang menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1. Teori Kuznet (Kurva U-Terbalik)

Teori ketimpangan pendapatan yang dikemukakan oleh Simon Kuznet pada tahun 1995, yang dikenal sebagai Kurva U-Terbalik, menjelaskan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat akibat dari pembangunan ekonomi yang belum merata. Seiring dengan kemajuan yang dicapai suatu negara, ketimpangan pendapatan cenderung mengalami penurunan. Fenomena ini umumnya terjadi di negara-negara berkembang, di mana wilayah yang lebih maju mampu memanfaatkan peluang pembangunan secara lebih optimal dibandingkan dengan wilayah tertinggal, yang sering mengalami keterbatasan akibat infrastruktur yang kurang memadai dan kualitas sumber daya manusia yang lebih rendah (Farhan & Sugianto, 2022). Berikut adalah kurva U-Terbalik yang merupakan hipotesis dari teori Kuznet:

**Gambar 2. Kurva U-Terbalik Teori Kuznet**



### 2.2. Teori Keadilan Ekonomi Islam

Teori Keadilan Ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, menekankan pentingnya pemerataan distribusi kekayaan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan upaya dalam mengurangi kesenjangan sosial (Lubis et al., 2025). Hal tersebut ditandai ketika pembiayaan disalurkan secara produktif kepada kelompok rentan, tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi pada skala mikro, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas ekonomi nasional secara keseluruhan, sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan secara struktural. Keadilan dalam ekonomi Islam berakar pada prinsip tauhid (keesaan Allah), khilafah (amanah pengelolaan sumber daya), dan maslahah (kesejahteraan umum) (Fitri et al., 2025). Keadilan ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi syariah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Keadilan

tersebut tercermin melalui distribusi kekayaan yang merata dan pengelolaan sumber daya yang memastikan setiap individu memperoleh haknya dan berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan (Ningsih & Mawardi, 2025).

### **2.3. Ketimpangan Pendapatan**

Ketimpangan pendapatan didefinisikan sebagai perbedaan tingkat pendapatan antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah yang maju dan wilayah yang masih tertinggal (Prasetya et al., 2022). Ketimpangan pendapatan merupakan konsep yang menggambarkan perbedaan tingkat kekayaan, taraf hidup dan pendapatan individu atau rumah tangga dalam masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakseimbangan distribusi antar wilayah akibat perbedaan faktor produksi dan ketersediaan sumber daya (Elverbinta Br et al., 2022). Semakin besar perbedaan tingkat pendapatan tersebut, maka semakin tinggi pula variasi dalam distribusi pendapatan

### **2.4. Pembiayaan Mikro Syariah**

Pembiayaan mikro syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang bertujuan untuk memberikan akses keuangan secara adil dan bebas riba kepada masyarakat berpendapatan rendah (Rumasukun & Hanifah, 2025). Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, tolong-menolong (ta'awun), dan kemitraan (syirkah) antara penyedia dana dan penerima manfaat. Bentuk pembiayaan yang umum digunakan meliputi akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan modal usaha).

### **2.5. Upah Minimum**

Upah menurut UU Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja. Upah tersebut ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja atau ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh beserta keluarganya atas pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilaksanakan. Upah minimum adalah batas standar terendah yang dijadikan acuan oleh pengusaha atau pelaku industri dalam menetapkan upah kepada pekerja di lingkungan usaha atau tempat kerjanya (Rosandi et al., 2017).

### **2.6. Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut (Mulyani, 2017) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan yang berlangsung secara berkesinambungan dalam kondisi ekonomi dan keuangan suatu negara yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan selama periode tertentu. Menurut (Sukirno, 2019) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil berubah. Menurut Arsyad dalam (Andiny & Mandasari, 2017) pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa melihat kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil

dari tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dan terjadi perubahan struktur ekonomi atau sistem kelembagaan.

## **2.7. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah alat untuk menilai kinerja pembangunan manusia dengan pendekatan tiga dimensi dasar. Menurut Badan Pusat Statistik (2024) terdapat tiga indikator yang digunakan untuk menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu umur panjang dan hidup sehat (long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living) (Mudana & Purbadharmaja, 2024). Umur panjang dan hidup sehat diukur melalui angka harapan hidup. Pengetahuan diukur dengan tingkat melek huruf dan lama pendidikan. Sedangkan standar hidup layak dicerminkan melalui pengeluaran perkapita riil (Khaeni, 2023).

## **3. Metode Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang berasal dari data laporan tahunan pada Badan Pusat Statistik dan Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2024. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh provinsi yang ada di Indonesia selama periode tahun 2020-2024. Dan didasari berbagai pertimbangan atau kriteria yang telah ditentukan, maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 17 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia yang memenuhi kriteria, sehingga data observasi yang digunakan sebanyak 85 data observasi. Penelitian ini menggunakan empat variabel utama yang didefinisikan sebagai berikut: Pertama, ketimpangan pendapatan (Y) sebagai variabel dependen yang diukur dari angka indeks gini dengan nilai berkisar antara 0 (merata sempurna) hingga 1 (timpang sempurna). Kedua, pembiayaan mikro syariah (X1) yang diukur dari tingkat persentase pembiayaan yang disalurkan. Kedua, upah minimum (X2) yang diukur dalam satuan juta rupiah. Ketiga, pertumbuhan ekonomi (X3) yang diukur menggunakan data laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Keempat, Indeks Pembangunan Manusia (X4) sebagai indikator pembangunan manusia yang merupakan gabungan dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan Microsoft Excel dan software Eviews 12.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1. Hasil Penelitian**

#### **4.1.1 Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa memiliki maksud untuk membuat kesimpulan yang menggeneralisasi atau berlaku umum. Fungsi dari analisis deskriptif sendiri berguna untuk mengetahui karakteristik dari setiap variabel yang diteliti, di antaranya adalah mengetahui nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari variabel yang diteliti.

**Tabel 1. Hasil Uji Analisis Deskriptif**

	<b>Indeks Gini</b>	<b>PMS</b>	<b>UM</b>	<b>PE</b>	<b>IPM</b>
<b>Mean</b>	0.359341	0.225071	14.78816	3.144	74.04941
<b>Median</b>	0.361	0.159	14.81485	4.55	72.94
<b>Maximum</b>	0.449	5.247	15.43833	6.95	83.08
<b>Minimum</b>	0.301	-0.543	14.34885	-9.34	68.25
<b>Std. Dev.</b>	0.037713	0.626896	0.250012	3.115288	3.453156

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif di atas, diperoleh rata-rata dari indeks gini adalah sebesar 0,359341, dengan nilai standar deviasi sebesar 0,037713. Variabel pembiayaan mikro syariah menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0.225071 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.626896. Variabel upah minimum menunjukkan nilai rata-rata sebesar 14,78816 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,250012. Variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,144 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,115288. Variabel Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan nilai rata-rata sebesar 74,04941 dengan standar deviasi adalah 3,453156.

#### **4.1.2 Hasil uji pemilihan model**

##### **1. Uji Chow**

Uji Chow dilakukan dengan pengambilan keputusan melalui hasil *Cross-Section Chi-Square*, jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka penelitian ini akan menggunakan *Fixed Effect Model* dan perlu melakukan uji Hausman. Adapun terjadi sebaliknya nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka model yang digunakan adalah *Common Effect Model* dan tidak perlu dilakukan uji Hausman (Widarjono, 2018).

**Tabel 2. Hasil Uji Chow**

<b>Effect Test</b>	<b>Prob.</b>
Cross-section F	0.0000
Cross-section Chi-Square	0.0000

Berdasarkan tabel diatas, nilai probabilitas *Cross Section Chi-Square* adalah sebesar  $0,0000 < 0,05$ . Hasil di atas membuktikan bahwa model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

##### **2. Uji Hausman**

Penentuan uji *Hausman* dapat dilihat dengan nilai probabilitas yang dihasilkan. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka penelitian ini lebih tepat menggunakan *Fixed Effect Model*. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka model yang lebih tepat untuk dipakai dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (Widarjono, 2018).

**Tabel 3. Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Prob.
Cross-section Random	<b>0.0001</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Cross-section Random adalah  $0,0000 < 0,05$ . Hasil di atas membuktikan bahwa model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

#### 4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menentukan apakah terdapat hubungan linier yang signifikan antara variabel independen (Ghozali, 2016). Proses uji ini melibatkan analisis koefisien korelasi antara setiap pasangan variabel independen. Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilaksanakan dengan melihat *correlation matrix*. Jika nilai *correlation matrix* kurang dari 0,85 maka tidak memiliki indikasi adanya gejala multikolinearitas.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas**

	PMS	UM	PE	IPM
PMS	1.000000	0.267142	-0.166716	0.289260
UM	0.267142	1.000000	0.122527	0.307635
PE	-0.166716	0.122527	1.000000	0.129356
IPM	0.289260	0.307635	0.129356	1.000000

Berdasarkan pengujian multikolinieritas di atas, hasilnya menyatakan bahwa seluruh nilai koefisien korelasi kurang dari 0,85, yaitu sekitar 0.267142, -0.166716, 0.289260, 0.122527, 0.307635 dan 0.129356. Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian ini model regresi tidak terjadi fenomena multikolinieritas.

##### 2. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji *White*. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka terdapat gejala heteroskedastisitas. Namun, apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau disebut juga homoskedastisitas (Ghozali, 2016).

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

<b>F-statistic</b>	0.808168	<b>Prob. F</b>	0.6576
<b>Obs*R-squared</b>	11.82718	<b>Prob. Chi-Square</b>	0.6202
<b>Scaled explained SS</b>	7.147086	<b>Prob. Chi-Square</b>	0.9089

Dari hasil analisis heteroskedastisitas menggunakan Uji *White* sebagaimana tergambar dalam tabel di atas, Probabilitas Chi-Square pada

Obs\*R-squared yaitu sebesar 0.6202 menunjukkan angka yang melebihi tingkat signifikansi 0,05 (0.6202 > 0.05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada kerangka model yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 4.1.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
<b>C</b>	-0.357219	0.444107	-0.804354	0.4242
<b>PMS</b>	-0.003799	0.001672	-2.272531	0.0264
<b>UM</b>	0.103035	0.045242	2.277437	0.0261
<b>PE</b>	0.000634	0.000399	1.589646	0.1168
<b>IPM</b>	-0.010915	0.003501	-3.117748	0.0027
<b>R-squared</b>	0.969182			
<b>Adjusted R-square</b>	0.959551			
<b>F-statistic</b>	100.6357			
<b>Prob (F-statistic)</b>	0.000000			

Dalam regresi Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia dengan menggunakan metode Fixed Effect Model (FEM) berikut adalah hasil regresi data panel:

$$\text{Indeks Gini} = -0.357219 - 0.003799 + 0.103035 + 0.000634 - 0.010915 + E$$

Hasil persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -0.357219. Ini berarti bahwa secara umum, Pembiayaan Mikro Syariah, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan bernilai konstan (tidak berubah), maka Ketimpangan Pendapatan (Y) akan bernilai -0.357219.
2. Variabel pembiayaan mikro syariah (X1) memiliki nilai koefisien regresi negatif sebesar -0.003799. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan nilai Pembiayaan Mikro Syariah sebesar 1 persen, maka akan menyebabkan penurunan nilai Ketimpangan Pendapatan sebesar -0.003799 persen, dan begitu sebaliknya.
3. Variabel Upah Minimum (X2) memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0.103035. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan nilai Upah Minimum sebesar 1 persen, maka akan menyebabkan peningkatan Ketimpangan Pendapatan sebesar 0.103035 persen, dan begitu sebaliknya.
4. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X3) memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0.000634. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan nilai

Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1 persen, maka akan menyebabkan peningkatan nilai Ketimpangan Pendapatan sebesar 0.000634 persen, dan begitu sebaliknya.

5. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (X4) memiliki nilai koefisien regresi negatif sebesar -0.010915. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1 persen, maka akan menyebabkan penurunan nilai Ketimpangan Pendapatan sebesar -0.010915 persen, dan begitu sebaliknya.

#### 4.1.5 Uji Hipotesis

##### Uji T Statistik

1. Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil pengujian pada variabel Pembiayaan Mikro Syariah (X1) diperoleh nilai probabilitas sebesar  $0,0264 < 0,05$  dengan nilai koefisien sebesar -0.003799. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mikro syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dimana ketika pembiayaan mikro syariah mengalami kenaikan maka ketimpangan pendapatan akan mengalami penurunan dan sebaliknya. Sehingga dapat dikatakan hipotesis ini diterima.

2. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil pengujian pada variabel Upah Minimum (X2) diperoleh nilai probabilitas sebesar  $0,0261 < 0,05$  dengan nilai koefisien sebesar 0.103035. Hasil ini menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dimana ketika upah minimum mengalami kenaikan maka ketimpangan pendapatan akan mengalami kenaikan dan sebaliknya. Sehingga dapat dikatakan hipotesis ini ditolak.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil uji t pada variabel Pertumbuhan Ekonomi (X3) diperoleh nilai probabilitas sebesar  $0.1168 < 0,05$  dengan nilai koefisien sebesar 0,000634. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dimana ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka ketimpangan pendapatan akan mengalami kenaikan dan sebaliknya. Sehingga dapat dikatakan hipotesis ini ditolak.

4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil uji t pada variabel Indeks Pembangunan Manusia (X4) diperoleh nilai probabilitas sebesar  $0,0027 < 0,05$  dengan nilai koefisien sebesar -0,010915. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel

indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dimana ketika indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan maka ketimpangan pendapatan akan mengalami kenaikan dan sebaliknya. Sehingga dapat dikatakan hipotesis ini diterima.

#### Uji F Statistik

**Tabel 7. Hasil Uji F-Statistik**

<b>F-statistic</b>	100.6357
<b>Prob (F-statistic)</b>	0.000000
<b>F tabel</b>	2,717

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil F-Statistik atau F-hitung sebesar 100,6357 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000000. Nilai  $n = 85$  dan  $k = 4$ , nilai F-tabel diperoleh sebesar 2,717 dengan  $df_1 (k-1) = 3$  dan  $df_2 (n-k) = 81$ . Nilai F-hitung  $> F$ -tabel ( $100,6357 > 2.717$ ) dan nilai probabilitas  $< 0,05$  ( $0,000000 < 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

#### Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>R-squared</b>	0.969182
<b>Adjust R-squared</b>	0.959551

Berdasarkan hasil regresi dengan *Fixed Effect Model*, diketahui bahwa nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,959551 atau 95,95%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel terikat yaitu Ketimpangan Pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu Pembiayaan Mikro Syariah, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 95,95%, sedangkan sisanya 4.05% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari variabel yang diteliti.

#### 4.2. Pembahasan

1. Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diperoleh bahwa variabel pembiayaan mikro syariah ( $X_1$ ) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y$ ). Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar -0.003799 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,0264 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Peran pembiayaan mikro syariah diharapkan dapat mempersempit kesenjangan pendapatan dengan membuka akses permodalan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan

pelaku usaha yang tidak memiliki akses perbankan karena tingginya biaya transaksi yang dikenakan oleh perbankan (Iqbal et al., 2015).

Hal ini sejalan dengan teori keadilan distribusi dalam ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan pemberdayaan kelompok rentan. Dengan adanya akses dana syariah, individu miskin dapat memulai atau mengembangkan usaha produktif. Peningkatan pendapatan dari usaha ini secara langsung mengangkat mereka keluar dari garis kemiskinan dan mengurangi jarak pendapatan dengan kelompok yang lebih kaya, sehingga menurunkan ketimpangan pendapatan (Syarifuddin & Sahidin, 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Miled et al., 2022) yang menunjukkan bahwa negara dengan pinjaman bruto per kapita yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat ketidaksetaraan pendapatan yang lebih rendah. Keuangan mikro terbukti membantu meningkatkan posisi pendapatan bagi masyarakat miskin, meskipun secara bertahap. Hasil penelitian serupa juga dilakukan oleh (Mwakalila & Muba, 2025) dan (Wardhana et al., 2020) yang menyatakan bahwa pinjaman bank mikro pada lembaga keuangan mikro berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan.

## 2. Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diperoleh bahwa variabel Upah Minimum ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y$ ). Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0.103035 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,0261 < 0,05$ . Temuan ini menunjukkan bahwa upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah belum memberikan dampak signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Helmy et al., 2024) yang menyatakan bahwa peningkatan upah minimum cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Hal tersebut karena upah minimum umumnya hanya berdampak pada sektor formal sementara sektor informal seperti petani, nelayan, dan buruh informal tidak secara langsung merasakan pengaruhnya. Penelitian lain yang dilakukan (R. N. Putri & Hanifa, 2024) juga menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan kebijakan kenaikan upah minimum yang tertuang dalam PERMENAKER Republik Indonesia No. 18 Tahun 2022 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini cenderung memperbesar ketimpangan pendapatan karena manfaat dari kenaikan upah minimum ini lebih dirasakan oleh pekerja sektor formal, terutama di wilayah perkotaan, sementara pekerja sektor informal yang dominan di pedesaan tidak menikmati dampak yang setara. Hal ini diperkuat dengan data dari

BPS (2024), dimana pekerja sektor informal di Indonesia lebih dominan yaitu sebesar 59,17% dibandingkan dengan pekerja formal yang sebesar 40,83%. Masyarakat yang bekerja pada sektor informal tidak mendapat perlindungan atau manfaat langsung dari kebijakan upah minimum yang ditetapkan, akibatnya kenaikan upah minimum tidak serta merta mengurangi ketimpangan justru akan menyebabkan ketidakseimbangan pasar tenaga kerja jika tidak dibarengi dengan kebijakan pengaman sosial lainnya.

### 3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diperoleh bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (X3) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar  $0.1168 > 0,05$ . Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum memberikan dampak signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Tidak signifikannya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan disebabkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang masih fluktuatif serta belum tersebar secara merata antar daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Helmy et al., 2024) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Salah satu faktor utama dari menurunnya ketimpangan ekonomi adalah pemerataan pendapatan. Apabila pendapatan belum merata maka ketimpangan cenderung tidak mengalami penurunan. Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian tersebut dilakukan oleh (Sulistyaningrum et al., 2022) dan (Yoertiara & Feriyanto, 2022) yang menyatakan bahwa naik atau turunnya pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

Hasil penelitian ini didukung oleh Teori Kuznet (1955) yang dikenal sebagai "Kurva U Terbalik" dimana meningkatnya ketimpangan pendapatan disebabkan pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh sektor padat modal yang hanya mampu menyerap sebagian kecil tenaga kerja dengan upah yang relatif tinggi, sementara sebagian besar penduduk tetap berada pada sektor informal dengan pendapatan rendah. Kondisi ini menyebabkan terkonsentrasinya kekayaan dan pendapatan pada kelompok yang lebih mampu memanfaatkan peluang pertumbuhan, sehingga ketimpangan pendapatan semakin melebar (Mudana & Purbadharmaja, 2024). Data BPS (2024) menunjukkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyerap 28,64% tenaga kerja dan menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 0,67% sedangkan sektor industri, manufaktur, perdagangan dan jasa menyerap 13,83% tenaga kerja dan menyumbang sebesar 18,98% pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan

ekonomi yang terjadi belum memberikan manfaat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan tersebut cenderung berpusat pada sektor-sektor tertentu atau hanya dirasakan oleh sebagian kecil pelaku ekonomi. Oleh karena itu, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak langsung terhadap penurunan ketimpangan pendapatan, terutama jika tidak diiringi dengan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan dan inklusi sosial yang kuat.

#### 4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diperoleh bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (X4) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar -0.010915 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,0027 < 0,05$ . Temuan ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan indeks pembangunan manusia dapat memberikan dampak signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasil ini sejalan dengan *human capital theory* yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas hidup seseorang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. IPM mencerminkan kemampuan negara untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan rakyat berkat tingginya harapan hidup. Namun, kondisi ini hanya terjadi di beberapa wilayah dengan tingkat pendapatan tinggi, fasilitas kesehatan memadai, dan taraf hidup yang baik. Sebaliknya, di wilayah terpencil yang jauh dari pusat kota, akses terhadap layanan terbatas dan pendapatan relatif lebih rendah. Becker dalam (Pradipta & Wijaya 2022) menyatakan bahwa pendidikan formal dan kesehatan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal dan harapan hidup individu, maka produktivitas tenaga kerja akan meningkat. Hal ini sejalan dengan teori human capital, yang menyebutkan bahwa pendidikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan karena pendidikan dan kesehatan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Berdasarkan data BPS (2024), provinsi dengan tingkat IPM yang tinggi memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah begitupula sebaliknya. Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan angka IPM sebesar 78,83 dengan tingkat ketimpangan pendapatan 0.321 diikuti provinsi Kepulauan Riau dengan angka IPM sebesar 77,97 memiliki tingkat ketimpangan pendapatan 0.307. Sedangkan provinsi Jawa Barat dengan angka IPM sebesar 74,09 memiliki tingkat ketimpangan pendapatan 0,421 diikuti provinsi Jawa Timur dengan angka IPM sebesar 74,09 dan tingkat ketimpangan pendapatan 0,372. Kemudahan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan

di Indonesia menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tersedianya akses pendidikan dan kesehatan yang merata, individu memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan karena pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki memadai untuk memenuhi tuntutan pasar kerja. Melalui pekerjaan tersebut, individu dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi sehingga berkontribusi pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan.

#### 5. Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh penulis, keempat variabel independen yaitu pembiayaan mikro syariah, upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia secara simultan menghasilkan nilai F-hitung sebesar 100,6357 lebih besar daripada F-tabel sebesar 2,717 dengan nilai probabilitas  $0,000000 < 0.05$ ). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mikro syariah, upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia secara signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Meidiyan et al., 2025) yang menghasilkan variabel upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan IPM secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian lain yang sejalan dengan temuan penelitian ini dilakukan oleh (Wardhana et al., 2020) yang menyatakan bahwa pinjaman dari bank mikro, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini sejalan dengan temuan (Rodionov et al., 2018) yang meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan pada wilayah-wilayah Federasi Rusia selama periode 2000-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia secara simultan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, semakin baik tingkat pertumbuhan ekonomi dan IPM secara bersama-sama, semakin menurunkan pula tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia.

#### 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian tentang Pembiayaan Mikro Syariah, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2020-2024, maka didapatkan kesimpulan bahwa variabel Pembiayaan Mikro Syariah dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sedangkan untuk variabel Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia sehingga naik atau turunnya pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel-variabel lain guna memperoleh hasil penelitian yang lebih menarik dan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penyebab ketimpangan pendapatan. Serta memperbarui tahun penelitian agar penelitian relevan dengan kondisi perekonomian terbaru.

## 6. Daftar Pustaka

- Ahmad, D., & Triani, M. (2019). Analisis Kausalitas Antara Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 604–615.
- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2), 196–210.
- Budiarto, S. A., Dai, S. I. S., Santoso, I. R., & Mulyati, Y. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(2), 261–268. <https://doi.org/10.37905/jsep.v2i2.29298>
- Damanik, A. M., Zulgani, & Rosmeli. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 15–25. <https://doi.org/10.22437/pdppd.v7i1.4533>
- Elverbinta Br, G., Daisy S. M., E., & D, Krest, T. (2022). Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(7), 37–48.
- Fanshuri, R., & Saputra, P. M. A. (2022). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Studi Kasus di Kabupaten Kawasan Sleingkar Willis Periode 2010-2019). *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1), 148–160. <https://doi.org/10.21776/jdessa.2022.01.1.14>
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243–258. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29>
- Febriyani, A., & Anis, A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Terhadap ketimpangan Distribusi Ketimpangan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(3), 9–16.
- Fitri, K., Sinka, V., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam sebagai Solusi untuk Ketimpangan Sosial di Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 2(4), 59–71.
- Fitriani, F., Rahim, A., & Samsir, A. (2018). *Analysis The Influence Of Investment Level, Government Spending, Labor To Economic Growth In Bulukumba District*.
- Helmy, A., Nujum, S., & Selong, A. (2024). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(1), 2024–2907.

- Hendarmin. (2019). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, dan Modal Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(2), 245–271. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i2.11186>
- Iqbal, S., Chaudry, S. N., Nadeem, I., & Zia ud Din, M. (2015). Impact of liquidity risk on firm specific factors: A case of islamic banks of Pakistan. *Journal of Business and Management Research*, 9(August 2018), 256–260. [www.sbp.com.pk](http://www.sbp.com.pk)
- Irawan, D., Wijimulawiani, B. S., & Hak, M. B. (2024). Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Investasi Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 - 2023. 6(3), 623–633.
- Javid, A. Y., & Abrar, A. (2015). Microfinance institutions and poverty reduction: A cross regional analysis. *Pakistan Development Review*, 54(4), 371–387. <https://doi.org/10.30541/v54i4i-iipp.371-387>
- Khaeni, S. N. N. (2023). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Investasi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.
- Makipantung, R. O., Walewangko, E. N., & Niode, A. O. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Wilayah Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(7), 157–168.
- Marbun, S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan penyaluran dana zakat terhadap kesenjangan pendapatan di Sumatera Utara periode 2011-2017. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/4477>
- Meidiyan, H., Asrini, & Irmanelly. (2025). Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(3), 623–636. <https://doi.org/10.63822/0pa9km04>
- Miled, K. B. H., Younsi, M., & Landolsi, M. (2022). Does microfinance program innovation reduce income inequality? Cross-country and panel data analysis. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/s13731-022-00195-7>
- Mudana, I. W. E., & Purbadharmaja, I. B. P. (2024). Pengaruh Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 9601–9612. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/31044>
- Mulyani, E. (2017). *Ekonomi Pembangunan*. UNY Press.
- Mwakalila, E., & Muba, S. (2025). The role of financial inclusion in reducing income inequality and poverty in Africa: A macro-level analysis. *Scientific African*, 29(June), e02811. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2025.e02811>
- Nalle, F. W., & Kiha, E. K. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 35–45.
- Ningsih, D. W., & Mawardi. (2025). Filosofis Pemikiran Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Sakti*, 14(2), 141–150.
- Novia, T., & Utomo, Y. P. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, Pekerja Berpendidikan SMA Ke Atas, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Bali Tahun 2016-2020. *PARETO : Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 1–12.

- Nurdiansyah, I., & Andani, L. (2022). Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4(2).
- Prasetya, M. A. W., Lutfitasari, P., Sairo, J., & Saraswati, B. D. (2022). Analisis Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores*, 12(1), 60–74. <https://doi.org/10.37478/als.v12i1.1137>
- Putri, A. S., & Anggraini, S. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kota Tanjungpinang. *Manajerial Dan Bisnis Tanjungpinang*, 7(2), 100–109. <https://doi.org/10.52624/manajerial.v7i2.2438>
- Putri, R. N., & Hanifa, N. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Jawa Timur. *INDEPENDENT: Journal Of Economics*, 4(3), 105–114.
- Raziq, K., & El Hasanah, L. L. N. (2023). Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss1.art2>
- Rodionov, D. G., Kudryavtseva, T. J., & Skhvediani, A. E. (2018). Human development and income inequality as factors of regional economic growth. *European Research Studies Journal*, 21(Special Issue 2), 323–337.
- Rosandi, I. R., Amin, H. M. J., & Dyastari, H. E. L. (2017). Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi Kasus Penerapan Upah Minimum Di Kota .... *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 1119–1130. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/JURNAL\\_INDRRA\\_RIKO\\_ROSANDI\\_\(08-24-17-03-04-18\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/JURNAL_INDRRA_RIKO_ROSANDI_(08-24-17-03-04-18).pdf)
- Rumasukun, S. H., & Hanifah, N. (2025). Dampak Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 2(3), 61–72. <https://ejournal.areas.or.id/index.php/JIESA/article/view/961>
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi Teori Pengantar* (Edisi 3). Rajawali.
- Sulistyaningrum, B. I., Bhinadi, A., & Astuti, R. D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 891–902. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.454>
- Sungkar, S. N., Nazamuddin, & Nasir, M. (2015). Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 40–53.
- Syarifuddin, M. S., & Sahidin, A. (2021). Filantropi Islam Menjawab Problem Kesenjangan Ekonomi Umat. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12(02), 101–109.
- Tarmidzi, A. (2012). *Pengaruh PDRB, Penduduk, IPM dan APBD Terhadap Konvergensi Pendapatan Di Indonesia Tahun 2004-2011*.
- Wardhana, L. I., Pramuditya, F., & Satriyanto, E. B. (2020). Microfinance and Inequality: Case of Indonesia. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 4(3), 211–228. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v4i3.211-228>
- Wardiyah, M. L. (2019). *Pengantar Perbankan Syariah*. CV Pustaka Setia.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EVIEWS*. STIM YKPN.
- Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-

provinsi di pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 92–100.  
<https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art9>  
Yunianto, D. (2021). Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Forum Ekonomi*, 23(4), 687–698.